

## PRESS RELEASE

### PAGUYUBAN LENDER DANA SYARIAH INDONESIA

Jakarta, 4 Desember 2025

#### PAGUYUBAN LENDER DSI MENGECEM KEGAGALAN MANAJEMEN, MENUNTUT TRANSPARANSI TOTAL, DAN MEMPERTANYAKAN SIAPA SEBENARNYA YANG MENGENDALIKAN PT DANA SYARIAH INDONESIA

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia dengan ini menyampaikan sikap resmi dan sangat tegas atas hasil pertemuan virtual (Zoom Meeting) dengan manajemen PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Alih-alih membawa harapan, pertemuan tersebut bagaikan pungguk merindukan bulan. Pertemuan tersebut menjadi momen yang memperlihatkan **betapa kacau, lemahnya tata kelola, dan betapa minimnya kemampuan manajemen memahami kondisi keuangan perusahaan** yang selama ini menghimpun dana masyarakat dan berada di bawah pengawasan OJK.

Pertemuan itu kembali menegaskan:

- **Data lender tidak akurat,**
- **Direksi tidak memahami arus kas perusahaan,**
- **Ekuitas berubah signifikan tanpa mereka tahu sebabnya,**
- **Progres penagihan borrower hampir nol,**
- **Kas perusahaan stagnan,**
- **dan rencana pemulihan tidak ada bentuknya.**

Semua ini bukan lagi sekadar tanda bahaya — tapi **alarm kebakaran yang sudah meraung-raung.**

---

#### 1. Klaim Dana Rp 3,5 Miliar untuk 14.000 Lender: Tidak Masuk Akal & Tidak Dapat Diverifikasi

DSI mengklaim hanya memiliki **Rp 3,5 miliar dana pemulihan** untuk dibagikan ke **14.000 lender**. Tapi yang lebih mengejutkan — **mereka sendiri tidak yakin dengan data lender mereka.**

Jadi, bukan hanya jumlah dananya yang kecil, tapi *data penerimanya pun tidak jelas*. Untuk perusahaan yang **wajib rapi, diaudit, diawasi OJK dan sudah bersertifikasi ISO**, fakta bahwa mereka **tidak tahu data lender-nya sendiri** adalah bentuk **kelalaian fatal**, bahkan bisa disebut **malapraktik pengelolaan.**

Ini semua disampaikan langsung dalam pertemuan — bukan asumsi.

---

## 2. Dana 0,2% dari Total Kewajiban: Pukulan Bagi Lender yang Sudah Terluka

Paguyuban menyoroti fakta bahwa **nilai Rp 3,5 miliar tersebut hanya 0,2% dari total kewajiban DSI** kepada lender. Angka ini bukan saja kecil — ini **menghina akal sehat**.

Lender yang menjadi korban bukan hanya investor biasa. Mereka adalah:

- Pensiunan,
- Korban PHK,
- Orang tua tunggal,
- Orang tua yang menyiapkan pendidikan anak,
- Rakyat kecil,
- Serta anak muda yang mulai membangun masa depan.

Mereka berharap solusi konkret. Namun yang diberikan DSI: **data yang tidak akurat, dana yang tidak mencukupi, dan rencana pemulihan yang tidak ada bentuknya**.

Tidak ada progres penagihan borrower.

Tidak ada peningkatan kas.

Tidak ada perkembangan berarti sejak Oktober.

Hanya janji — tanpa eksekusi. Mereka korban janji manis, “Apapun Profesimu Produktifkan di Dana Syariah”

---

## 3. Direksi Tidak Mengetahui Cash-In & Perubahan Ekuitas: Pertanyaan Siapa Sebenarnya yang Mengurus Perusahaan?

Bagian paling memprihatinkan — sekaligus paling mengejutkan — muncul saat Paguyuban mempertanyakan hal paling dasar:

- **Posisi cash-in perusahaan, dan**
- **Perubahan ekuitas signifikan pada tahun 2025.**

Namun TA — yang menjabat sebagai direksi sekaligus orang yang disebut memahami akuntansi — secara terbuka menyatakan **tidak tahu** mengenai kedua hal tersebut.

Ini bukan lagi red flag. Ini **bendera merah raksasa ukuran billboard bundaran HI**.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar:

1. **Bagaimana mungkin direksi tidak mengetahui arus kas perusahaan sendiri?**
2. **Apakah TA benar-benar seorang direksi, atau ada “direksi di atas direksi” yang sebenarnya mengendalikan DSI?**
3. **Jika TA tidak tahu cash-in dan ekuitas, lalu siapa yang menyusun laporan akuntansinya?**

#### 4. Kepada siapa laporan keuangan DSI sebenarnya disampaikan?

Ketidaktahuan semacam ini bukan sekadar kelemahan internal — ini indikasi **ketidakteraturan struktural**, bahkan potensi adanya **pihak yang beroperasi di luar struktur resmi**.

---

#### 4. Janji Pencairan 8 Desember Tidak Selaras dengan Realitas Kas yang Hanya 0,2%

DSI menjanjikan pencairan dana mulai **8 Desember 2025**.

Namun kembali lagi — dengan dana hanya **0,2% dari total kebutuhan setara Rp 3.500.000.000**, bagaimana mungkin DSI bisa menjanjikan pemulihan **100% dalam waktu kurang dari setahun?**

Secara matematika saja tidak masuk akal.

Secara logika bisnis pun tidak mungkin.

Dalam hampir dua bulan sejak Oktober:

- Tidak ada progres penagihan borrower,
- Tidak ada kenaikan kas,
- Tidak ada rencana pemulihan yang konkret.

Namun janji pencairan tetap diumbar. Ini membuat janji tersebut terdengar bukan seperti rencana, tetapi **pengalihan isu sementara**.

---

#### 5. Temuan Over Appraisal: Penyimpangan yang Merugikan Lender

DSI juga menjelaskan salah satu penyimpangan yang terjadi: **over appraisal**.

Akibatnya:

- nilai jaminan pada saat penjualan **lebih rendah dari kewajiban**,
- sehingga tidak mampu menutupi nilai yang seharusnya dikembalikan kepada lender.

Dengan kata lain, penilaian jaminan yang tidak realistis di masa lalu kini menjadi beban yang harus ditanggung lender.

---

#### 6. Paguyuban Menuntut Penyaluran Dana Rp 3,5 Miliar Secara Proporsional & Transparan

Paguyuban Lender DSI menegaskan tuntutan:

- **Seluruh dana Rp 3,5 miliar** — berapapun angka realnya — harus segera disalurkan **secara proporsional** kepada lender **dengan data yang valid**.
- Tidak ada alasan tambahan.
- Tidak ada penundaan.

- Tidak ada permainan angka.
- Tidak ada manuver internal.

Uang tersebut adalah hak lender, MILIK LENDER, bukan komoditas untuk diputarbalikkan oleh manajemen. KAMI ADALAH KORBAN DAN KAMI AKAN MEMPERTAHANKAN HAK-HAK KAMI.

---

## 7. Extra Balance Sheet Yang Belum Bisa Dibuka ke Publik

DSI menyampaikan bahwa mereka memiliki **extra balance sheet** yang berisi:

- aliran dana lender masuk,
- penyaluran dana ke borrower secara lengkap, dan
- rincian posisi borrower.

Namun dokumen tersebut **tidak dapat ditampilkan sekarang**, karena dianggap sensitif dan harus menunggu izin OJK. DSI menjanjikan dokumen ini akan disampaikan setelah tanggal **10 Desember 2025**, *dengan catatan jika OJK mengizinkan*.

---

## 8. Sumber Cash-In yang Diupayakan DSI Masih Bersifat ‘Rencana’, Bukan Realisasi

DSI memaparkan empat sumber utama cash-in yang sedang mereka upayakan:

### a. Penagihan ke Borrower

Masalahnya, progres sejak Oktober **mendekati nol**.

### b. Penjualan Aset Jaminan Borrower

Termasuk membuka opsi agar **lender ikut membeli** aset jaminan tersebut — sebuah usulan yang menimbulkan tanda tanya besar tentang efektivitas manajemen.

### c. Penjualan Aset Perusahaan

Termasuk **3 unit kantor DSI di SCBD**, di mana **1 unit sudah ditawarkan secara aktif**.

### d. Investor Asing & Lokal

Masih tahap eksplorasi awal, tanpa nominal pasti, tanpa timeline jelas.

Keseluruhan sumber ini masih **sebatas rencana**, tanpa realisasi signifikan.

---

## 9. Sikap Tegas Paguyuban: Tidak Mau Jadi Pengawas BPP & Siap Ambil Langkah Hukum

Paguyuban, mewakili ribuan lender di seluruh Indonesia, menegaskan:

- **Menolak** dilibatkan sebagai pengawas BPP (karena itu bukan tanggung jawab lender, melainkan manajemen perusahaan).

- **Menolak** segala upaya DSI melempar tanggung jawab kepada lender.
- **Akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak lender**, baik melalui jalur hukum maupun mekanisme lain apabila DSI terus gagal memberikan transparansi, kepastian, dan komitmen nyata.
- **Akan terus mengawal proses pemulihan hingga tuntas.**

Masalah DSI bukan sekadar keterlambatan pencairan — tetapi **indikasi kuat kegagalan tata kelola, kelemahan manajemen, dan ketidaktransparanan yang sistematis.**

Paguyuban tidak akan diam, tidak akan mundur, dan tidak akan berhenti sampai seluruh kebenaran terungkap dan dana lender dipulihkan. Paguyuban juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat telah hancur, dan **DSI wajib bertanggung jawab penuh atas kekacauan ini.** Tidak ada ruang untuk alasan, penundaan, atau ketidakjelasan lebih lanjut.

Lebih jauh, Paguyuban menegaskan bahwa **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** sebagai lembaga pengawas yang memiliki mandat untuk memastikan transparansi, integritas, dan tata kelola industri keuangan **ikut bertanggung jawab** dalam memastikan kasus ini diselesaikan secara tuntas.

OJK wajib:

- memastikan DSI menyampaikan laporan keuangan yang akurat dan lengkap,
- mengawasi proses investigasi, pemulihan, dan pencairan dana lender,
- menindak setiap pelanggaran yang ditemukan,
- dan menjamin bahwa seluruh mekanisme perlindungan konsumen **berjalan sebagaimana mestinya.**

Paguyuban menegaskan bahwa **tidak ada toleransi bagi kelalaian pengawasan**, terlebih ketika ribuan lender menjadi korban. Pengawasan OJK tidak boleh sebatas administratif, tetapi harus **proaktif, tegas, dan transparan**, karena mandat perlindungan konsumen bukan hanya slogan, tetapi tanggung jawab hukum dan moral.